

A. PENGERTIAN DAN PENEKASAN JUDUL

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan tentang pengertian dan penegasan judul skripsi ini yaitu :

Yang dimaksud dengan tinjauan hukum adalah suatu pandangan dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan terhadap suatu kegiatan.⁶

Yang dimaksud dengan tentang adalah mengenai, terhadap.⁷

Pengertian perjanjian menurut Prof. R. Subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁸

Dan yang dimaksud dengan penerbitan kartu kredit adalah dikeluarkannya kartu kredit oleh Bank yang bersangkutan dan diberikan kepada nasabah pemegang kartu kredit.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan kartu kredit adalah dipakainya kartu kredit sebagai alat pembayaran barang/jasa dan juga dapat

⁶ Drs.Sulchan Yasyin, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Penerbit PT. Aminah Surabaya. Hal 222.

⁷ Drs. Sulchan Yasyin, Op,Cit, Hal 224

⁸ Prof. R. Subekti. Hal 1

⁹ Prof. Abdul Kadir Muhammad. SH dan Rilda Murniati, SH.M.Hum. Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.Bandung 200. Hal 269

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Ali.Moch Chidir et al. Pengertian-Pengertian Elemen Hukum Perjanjian, CV Mandar Maju, Bandung 1991.
- Kasmir, SE, MM. Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung 1993.
- Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Menyangkut Masa Purnabakti, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung 2001.
- Munir Fuady,SH.M.H,LL.M. Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Prof, Abdulkadir Muhammad, SH dan Rilda Murniati, SH. M.Hum. Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum (Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang), CV Mandar Maju, Bandung 1994.
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Internasa Jakarta 1984.
- Dahlan Siamat,S.E, Manajen Lembaga Keuangan, PT.Internedia Jakarta 1995.
- Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2003.

UNDANG-UNDANG:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Berlakunya

Undang-undang ini apabila Perusahaan Kartu Kredit adalah Bank atau berurusan dengan Bank.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Berlakunya Undang-undang ini apabila Perusahaan Kartu Kredit Melanggar Kewajiban dan Larangan yang secara Perdata merugikan Konsumen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Perpajakan, Berlakunya Undang-undang ini Karena Perusahaan Kartu Kredit Wajib Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Penghasilan, Pertambahan Nilai dan Jenis Pajak Lainnya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Berlakunya undang-undang ini Karena Perusahaan Kartu Kredit Wajib Melaksanakan Pembukuan dan Pemeliharaan Dokumen Perusahaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pembiayaan Melakukan Kegiatan yang meliputi antara lain Usaha Kartu Kredit.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 448/KMK.017/2000. Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, Kartu Kredit merupakan salah satu jenis usaha dari Lembaga Pembiayaan yang berbentuk Perusahaan Kartu Kredit.